LKjIP

Laporan Kerja Instansi Pemerintah

DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat disusun.

LKjIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 ini merupakan dokumen laporan evaluasi SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 dan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2024, semoga bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan Allah SWT meridhoi segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Dinas Sosial Kota Pasuruan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan religius.

Pasuruan, 28 Februari 2024
Dinas Sosial Kota pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760919 199602 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan good governance dan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi,nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparatur negara.

Dinas Sosial Kata Pasuruan sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Kesejahteraan sosial.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Sosial Kata Pasuruan, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Pengukuran kinerja diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kata Pasuruan Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kata Pasuruan dituangkan dalam 6 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dari capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut, secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan dengan rata-rata berhasil. Setelah dilakukan analisis maka didapatkan bahwa secara umum menunjukan suatu keberhasilan. Adapun Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yaitu persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar dengan target tahun 2024 sebesar 95% dan realisasi mencapai 97,85%. Dapat disimpulkan dari capaian yang diperoleh telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian sasaran tersebut antara lain :

1. Ketersediaan dana, sumber daya manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya.
2. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan serta terfasilitasinya kegiatan yang berhubungan dengan PSKS dan proses koordinasi serta komunikasi yang baik antara PSKS dan Dinas Sosial.

Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Berusaha lebih menjangkau PPKS yang membutuhkan layanan
2. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang lebih baik dengan pilar-pilar Dinas Sosial

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya tetap sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 1
1.2.1 Isu Strategi 1
1.2.2 Peta Proses Bisnis 4
1.2.3 Dukungan SDM 18
1.2.4 Sarana dan Prasarana 18
1.2.5 Anggaran 22
1.3 Dasar Hukum 22
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 23
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 24
1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2023 24
BAB II 25
PERENCANAAN KINERJA 25
2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator kinerja lima tahun terakhir Perangkat Daerah 25
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 28
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 28
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 37
BAB III 38
AKUNTABILITAS KINERJA 38
3.1 Capaian Kinerja 38
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 38
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 38
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 41
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi 41
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 42
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 42
3.1.7 Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya 43
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 44
3.2 Realisasi Anggaran 48
3.3 Inovasi 48

3.4 Penghargaan 48
BAB IV 49
Penutup 49
4.1 Kesimpulan 49
4.2 Rekomendasi 50
LAMPIRAN 51

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2024 22
2.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 27
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 28
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan 28
2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 29
2.5 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 29
2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 33
2.7 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Perubahan tahun 2024 33
3.1 Pengkatagorian Capaian Kinerja 38
3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 38
3.2.1 Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 39
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 41
3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 42
3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota 42
3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 42
3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 43
3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 44
3.9 Realisasi Anggaran 48

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan rangkaian upaya untuk merealisasikan amanat konstitusi. Yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan tersebut hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. antara lain meliputi pembangunan fisik / radikal dan mental / batinia untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku pembangunan.

Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah pembangunan itu telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka perlu kiranya di buatkan suatu laporan yang berisi tentang hasil kegiatan pembangunan dan evaluasinya agar dapat diketahui keberhasilannya ataupun kekurangannya. Dengan harapan kedepannya dapat dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan pelayanan yang optimal di bidang sosial, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kota Pasuruan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

i. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   a. Peningkatan Kapasitas PSKS
   b. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial.
   c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat.
   d. Pembinaan Karang Taruna dan Karang Wherda.

ii. Bidang Rehabilitasi Sosial
   a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penduduk Rentan dan Termarjinalkan (Kelompok usia produktif dengan resiko tertentu)
c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang dengan Disabilitas (ODGJ)
e. Pendampingan Anak berhadapan dengan hukum

iii. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
a. Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS)
b. Pemberian bantuan bagi Masyarakat
c. Penanganan Sosial Korban Bencana
d. Koordinasi Taruna Siaga Bencana
e. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan No 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial adalah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan kebijakant eknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan Pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
7. Pelaksanaan kegiatan peñatausahaan Dinas Sosial.

Berikut bagan struktur organisasi yang tertera pada Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

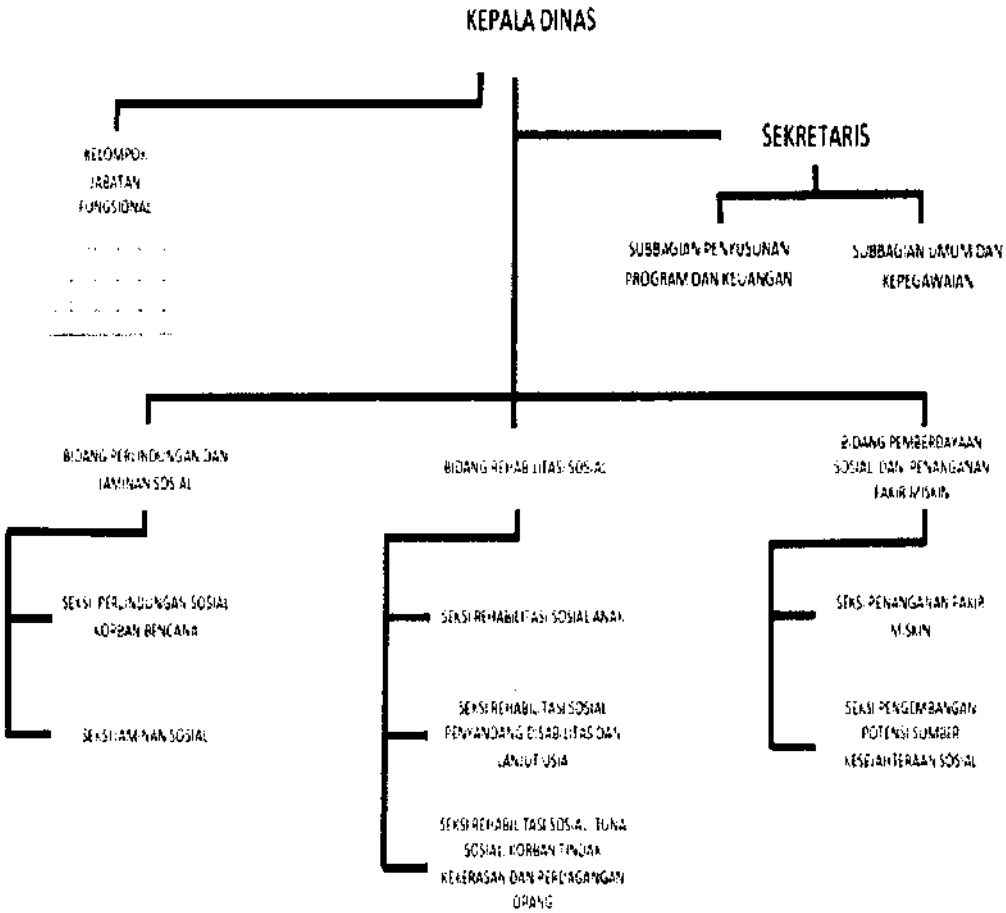

1.2.2 Peta Proses

Alur Probis beserta narasi

Perlindungan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

20 P4.1 PERLINDUNGAN PPKS

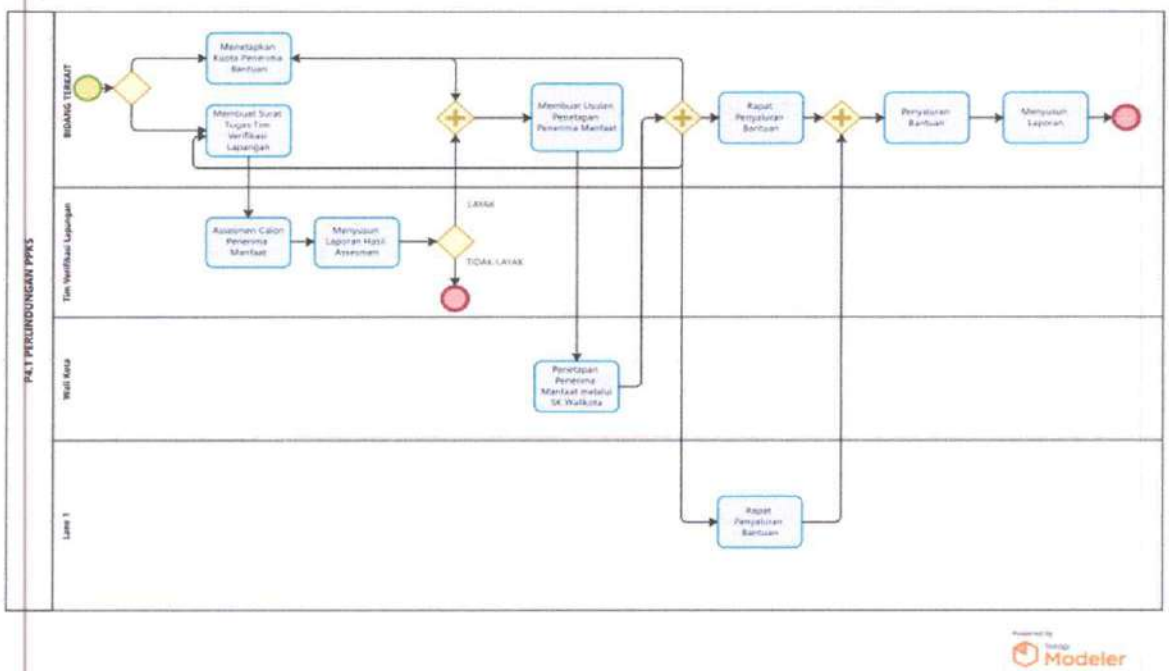

Gambar 1.2 Perlindungan PPKS

Perlindungan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Merupakan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Proses Bisnis ini terkait dengan pemberian bantuan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Yatim, Dhuafa, Lansia Potensial, Alat Bantu.

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PPKS NON-FAKIR MISKIN

34 P5.2 BANTUAN SOSIAL PPKS NON-FAKIR MISKIN

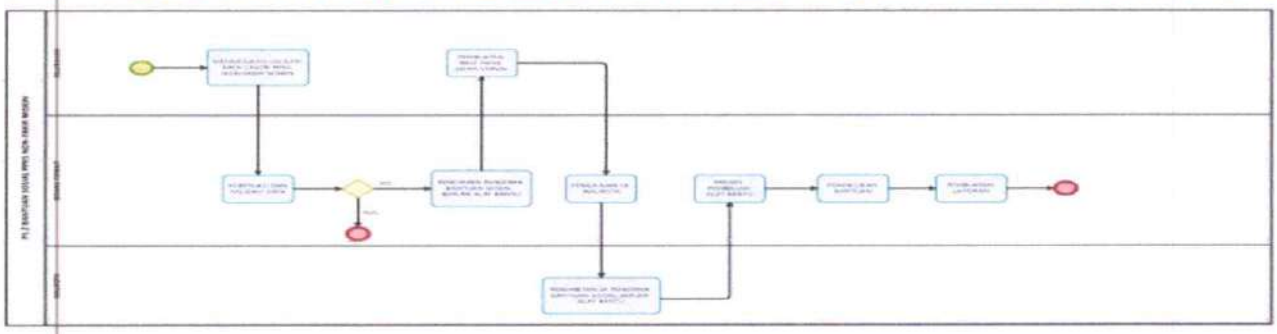

Gambar 1.3 Bantuan Sosial PPKS NON-FAKIR MISKIN

Bantuan Sosial PPKS Non-Fakir miskin Merupakan Proses pengajuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang akan didaftarkan penerima bantuan sosial, setelah diajukan calon penerima akan dilakukan verifikasi dan validasi apabila layak menri Bisnis yang terkait dengan bantuan bagi Disabilitas

PENGELOLAAN SHELTER T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap)

35 P5.3 PENGELOLAAN SHELTER

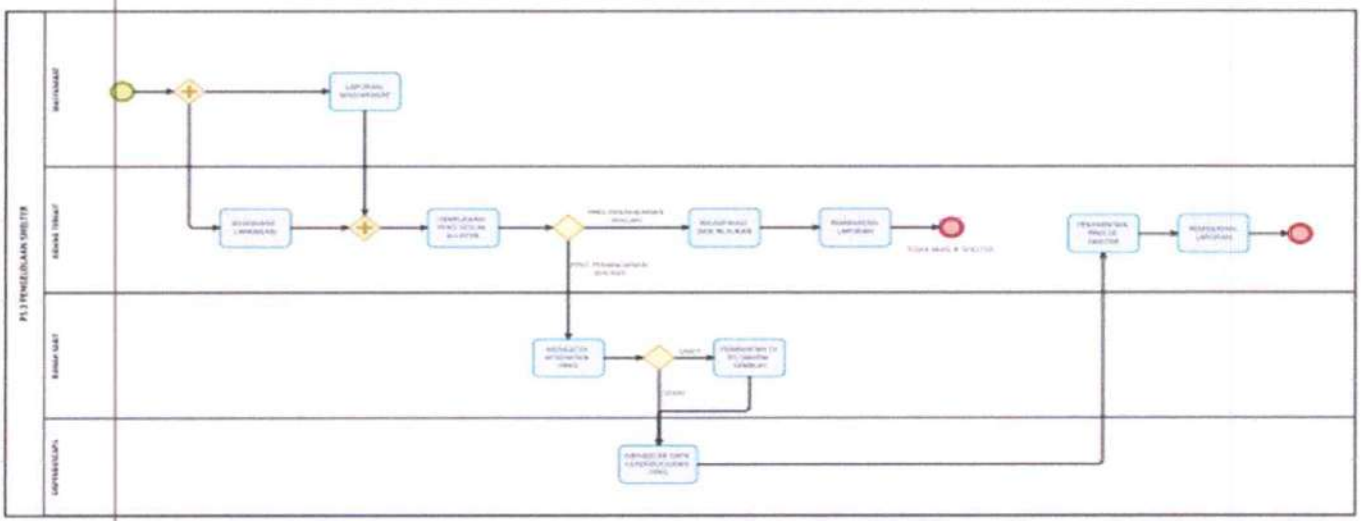

Gambar 1.4 Pengelolaan Shelter

Pengelolaan Shelter Merupakan Penangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dimana berawal dari aduan Masyarakat yang akan di tindak lanjuti atau dilakukan assessment oleh petugas Dinas Sosial, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan Kesehatan terlebih dahulu lalu akan dibawa untuk melakukan pengecekan Kesehatan dan dilakukan sampai sembuh. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial akan dilakukan pengecekan data diri, Dinas Sosial akan melakukan kluster terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk dilakukan rujukan.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terkait dengan Anak Jalanan, Lansia Terlantar,Orang Dalam Gangguan Jiwa.

52 P6.4.1.1 PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL

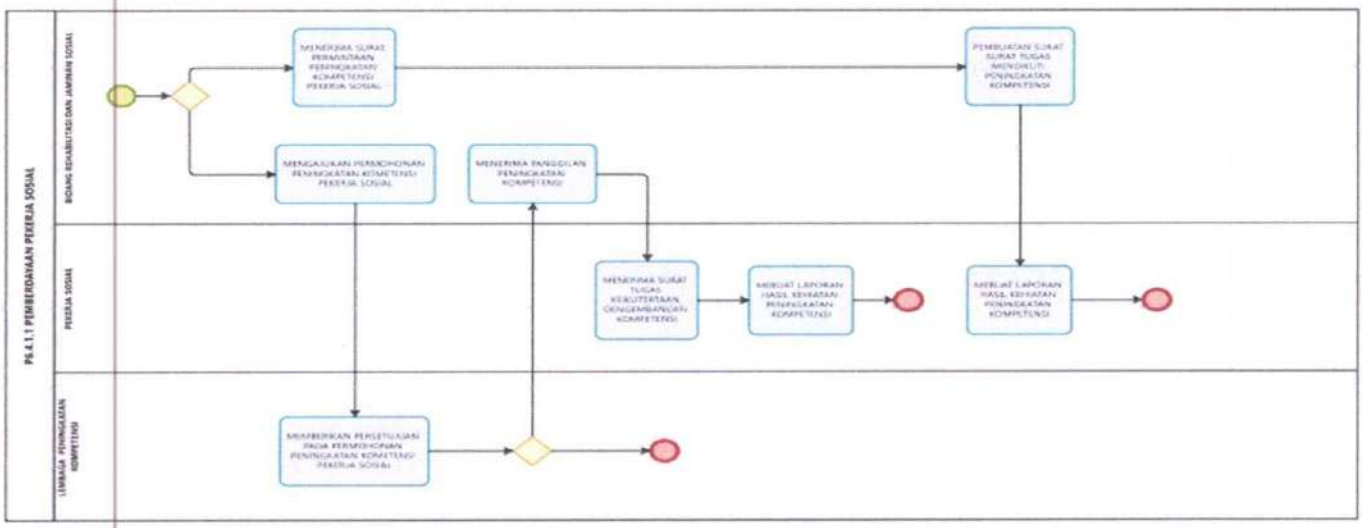

Gambar 1.5 Pemberdayaan Pekerja Sosial

Pemberdayaan Pekerja Sosial Merupakan pengusulan bagi Pekerja Sosial Masyarakat,Tenaga Kesejahteraan Sosisal Kecamatan dan Pilar-pilar Sosial. Pemberdayaan Pekerja Sosial ini akan diajarkan untuk menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dimana nanti akan dibuatkan laporan hasil kegiatan.

UJI KOMPETENSI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL ATAU TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

53 P6.4.1.1 UJI KOMPETENSI PSKS ATAU TKSK

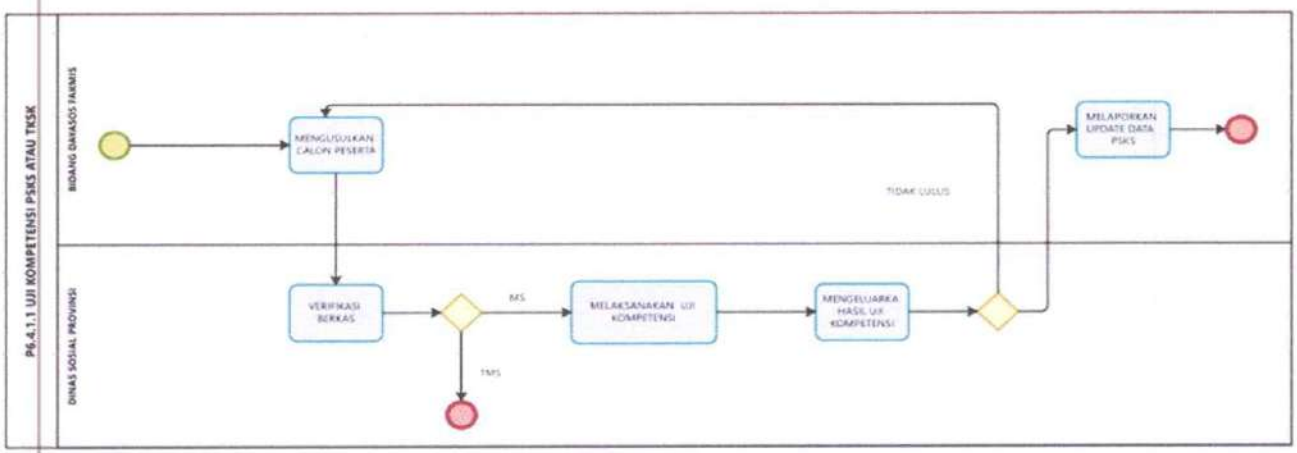

Gambar 1.5 Uji Kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Uji Kompetensi PSKS atau TKSK Merupakan Proses pengusulan peserta yang akan melakukan Peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Pengusulan Calon Peserta dilakukan oleh bidang dayasos fakmis yang akan dikirimkan ke Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Provinsi akan melakukan verifikasi berkas. Dinas Sosial Provinsi akan melakukan uji kompetensi dan akan mengeluarkan hasil uji kompetensi. Hasil dari uji kompetensi akan dikirim kepada Dinas Sosial (sebagai pengusul) yang nantinya akan di update data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

SERTIFIKASI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

55 P6.4.1.2 SERTIFIKASI PSKS

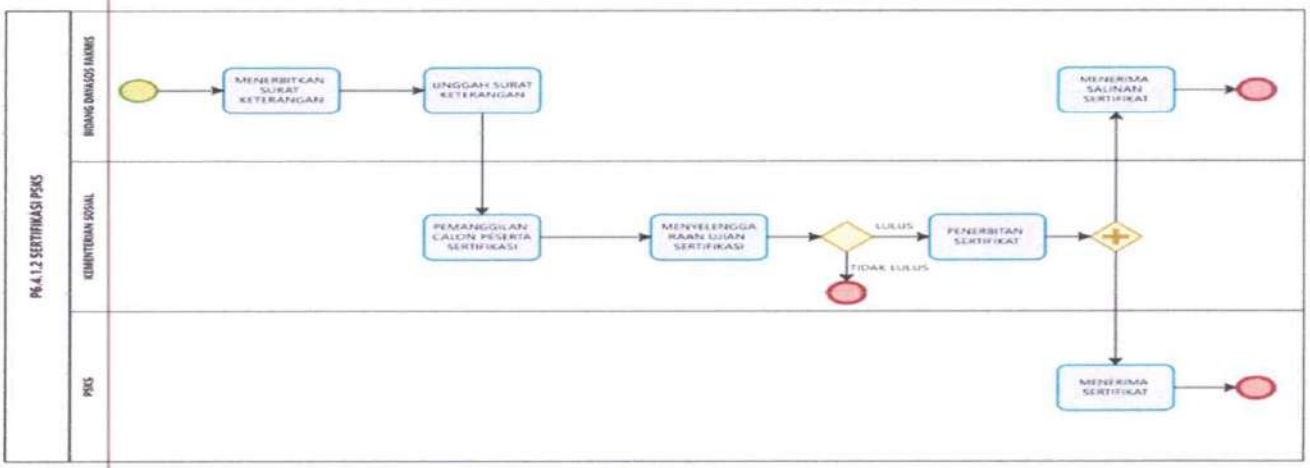

Sertifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial merupakan proses untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pekerja sosial. Bidang dayasos fakmis menerbitkan surat pengusulan calon peserta dan surat dikirimkan ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melakukan pemanggilan kepada calon peserta dan melaksanakan ujian sertifikasi. Setelah dilakukan pengujian Kementrian Sosial mengeluarkan hasil peserta, hasil akan dikirimkan kepada Dinas Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

BIMBINGAN TEKNIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

56 P6.4.1.3 BIMTEK PSKS

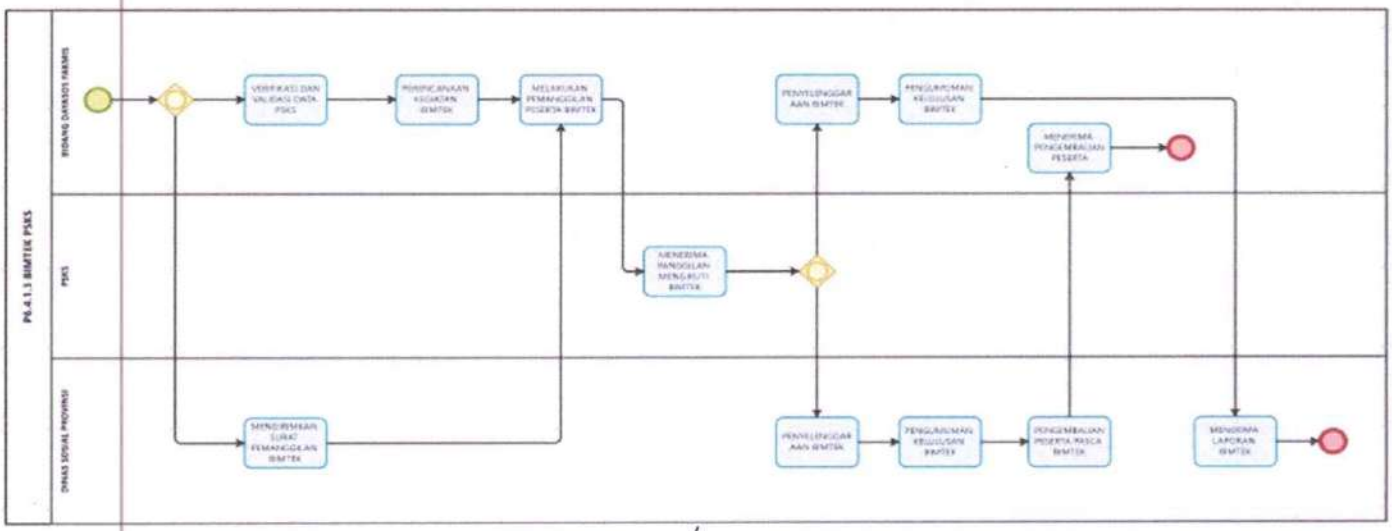

Gambar 1.7 Bimbingan Teknis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Bimbingan teknis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ini melalui proses pengusulan dari bidang dayasos fakmis yang nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi data potensi dan sumber dan kesejahteraan sosial setelah itu akan dilakukan perencanaan kegiatan bimbingan teknis untuk peserta baru sedangkan peserta yang sudah aktif akan dilakukan pemanggilan bagi peserta bimbingan teknis. Peserta akan menerima panggilan dan akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Bidang dayasos fakmis dan Dinas Sosial Provinsi akan melakukan kegiatan bimbingan teknis apabila peserta dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan kriteria maka akan diumukan kelulusannya. Dinas Sosial Provinsi mengirim Kembali peserta yang telah mengikuti bimbingan teknis, bidang dayasos menerima peserta bimbingan mengirimkan hasil laporan kepada Dinas Sosial Provinsi.

PENGUSULAN DATA PBI JKN

22 P4.2.1 USULAN DATA PBI JKN

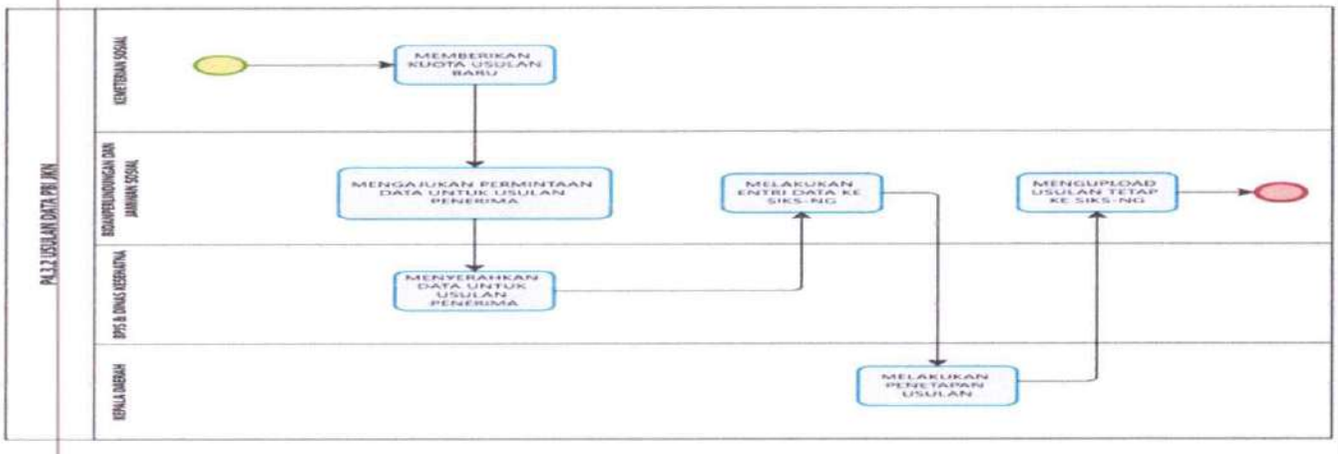

Gambar 1.8 Pengusulan Data PBI JKN

Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dilakukan dengan adanya kuota usulan baru yang nantinya akan diajukan permintaan data untuk penerima usulan bantuan iuran jaminan kesehatan.Data akan yang telah diusulkan melalui bidang perlindungan dan jaminan sosial dikirim ke BPJS dan Dinas Kesehatan, BPJS dan Dinas Kesehatan melakukan sanding data, setelah dilakukan sanding data dikirim ke Dinas Sosial yang akan di entry data ke SIKS NG. Data yang telah dikelola akan dilakukan penetapan oleh Kepala Daerah yang nanti hasilnya akan di upload usulan tetap ke SIKS NG oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

PENGUSULAN DATA DTKS

25 P4.3.1.1 USULAN BARU

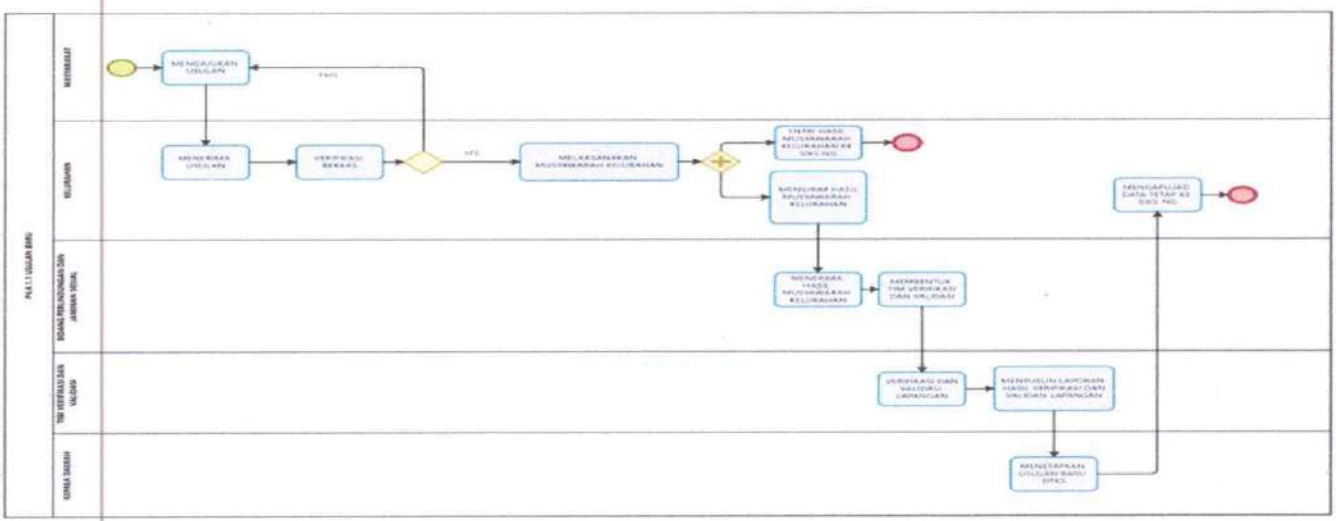

Gambar 1.9 Pengusulan Baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Merupakan Proses Bisnis yang terkait dengan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengusulan Baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan oleh masyarakat dengan cara pungusulan kepada kelurahan. Kelurahan melakukan verifikasi kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kelurahan melaksanakan musyawarah kelurahan yang nantinya akan di entry hasil msuywarah kelurahan atau mengirim hasilnya kepada Bidang perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menerima hasil musyawarah kelurahan dan membentuk tim verifikan dan validasi. Tim verifikasi dan validasi melakukan pengecekan kelengkapan data yang nantinya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan akan di upload melalui aplikasi SIKS NG.

PEMBERIAN TALI ASIH VETERAN

33 P4.5 PEMEBERIAN TALI ASIH VETERAN

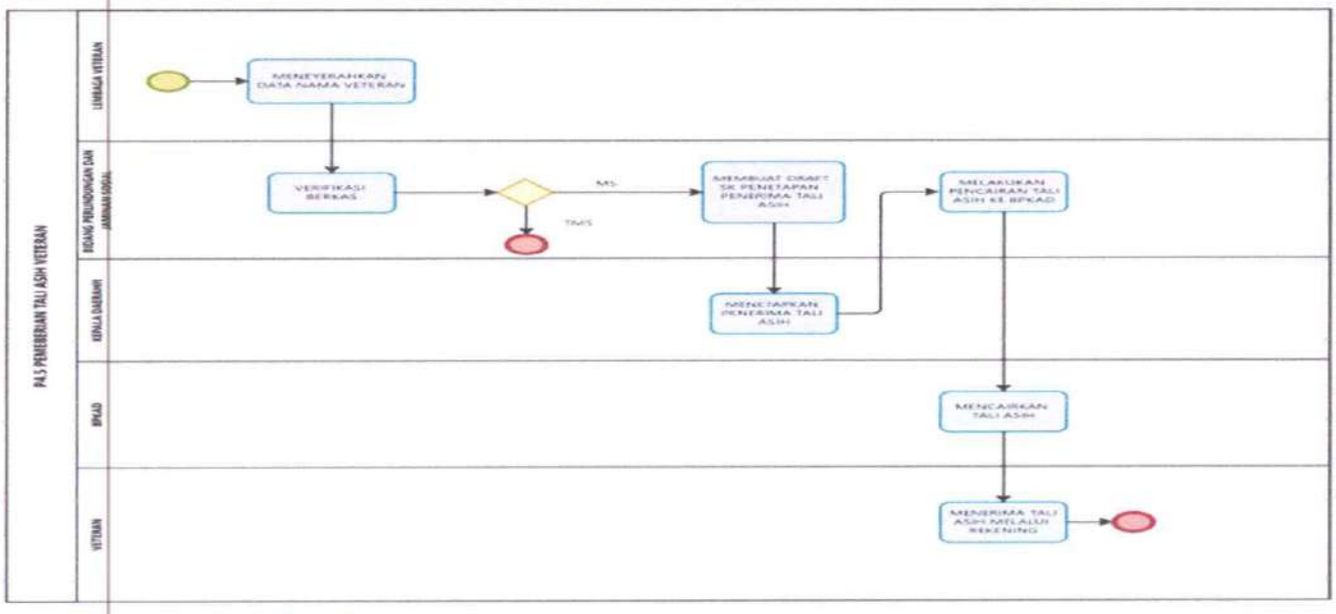

Gambar 1.10 Pemberian Tali Asih Veteran

Pemberian Tali Asih Veteran sebagai pemberian bantuan sosial kepada seseorang yang telah purna tugas dalam perjuangan, pembela dan perdamaian.

PERBAIKAN DATA DTKS

27 P4.3.1.3 PERBAIKAN DATA

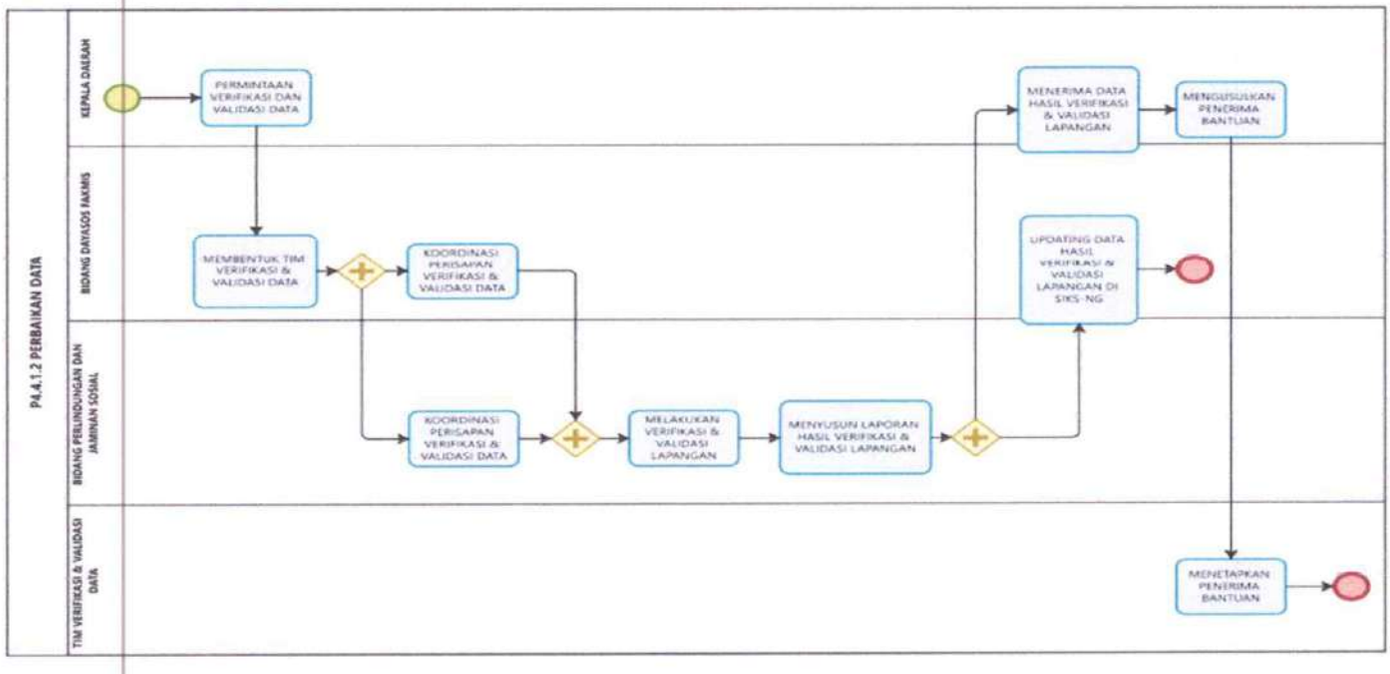

Gambar 1.11 Perbaikan DTKS

Perbaikan DTKS merupakan proses perbaikan/update data terkait data terkini agar menjadikan data yang akurat.

FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

28 P4.3.2 FASILITASI BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA

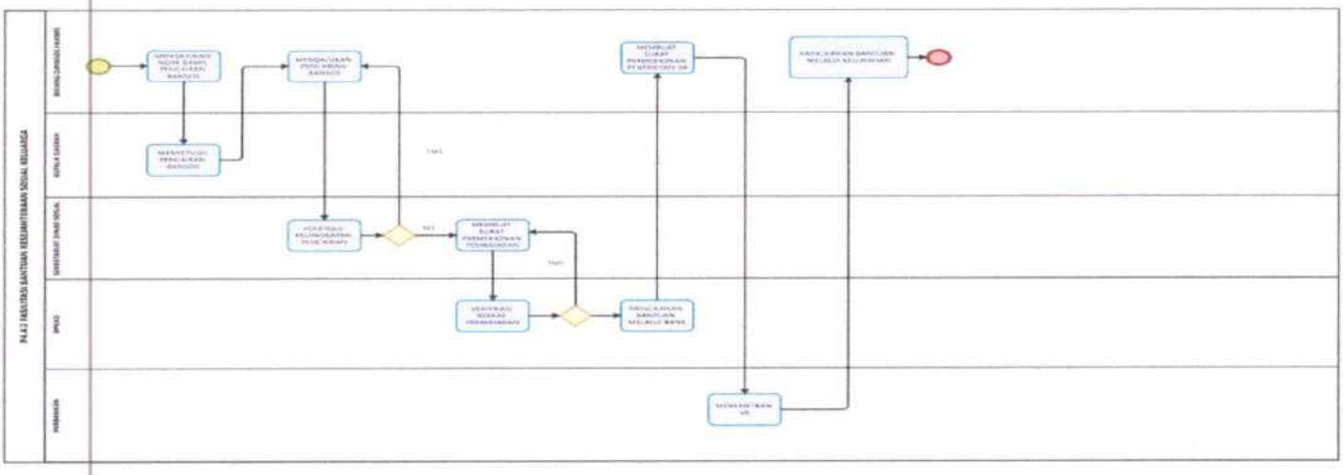

Gambar 1.12 Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga

Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga merupakan pemberian bantuan sosial dan hibah yang diberikan kepada Masyarakat dan Lembaga.

PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

43 P6.2.2 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

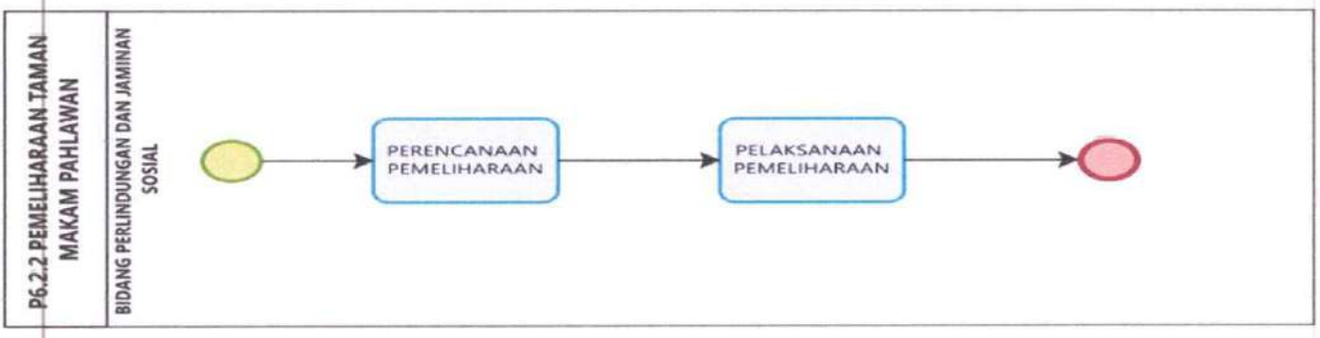

Gambar 1.13 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan pemeliharaan terhadap aset negara.

PEMBERDAYAAN TAGANA

54 P6.4.1.2 PEMBERDAYAAN TAGANA

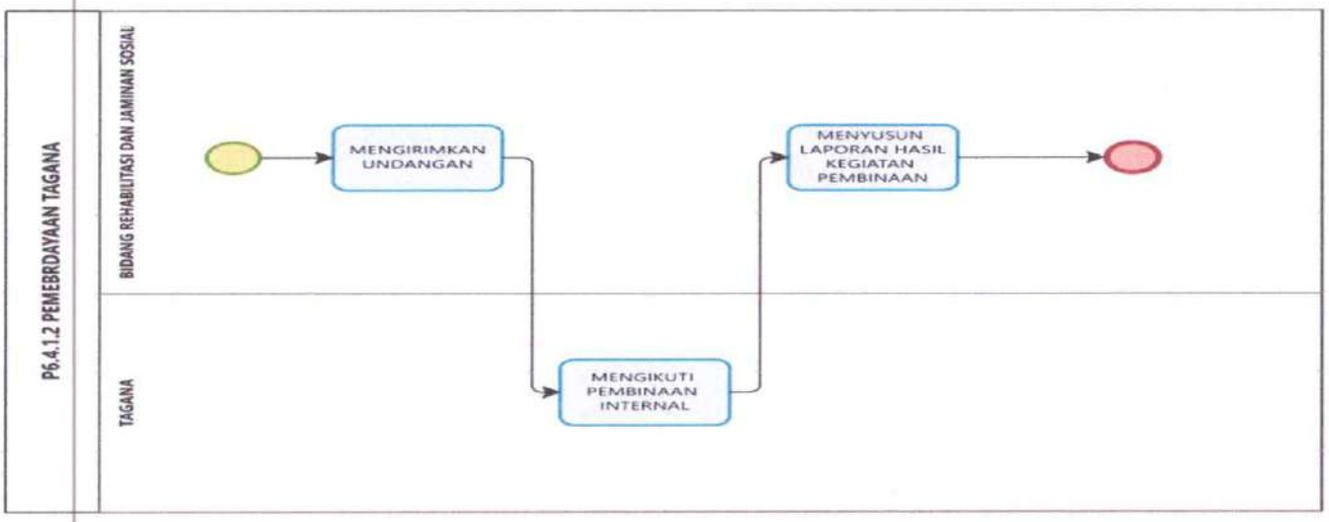

Gambar 1.14 Pemberdayaan Tagana

Pemberdayaan Tagana merupakan pembinaan terhadap anggota tagana dalam penanganan bencana yang nantinya akan disusun pelaporan hasil pembinaan tagana.

FASILITASI PENYALURAN BANTUAN NON-TUNAI

29 P4.3.3 FASILITASI PENYALURAN BANTUAN NON-TUNAI

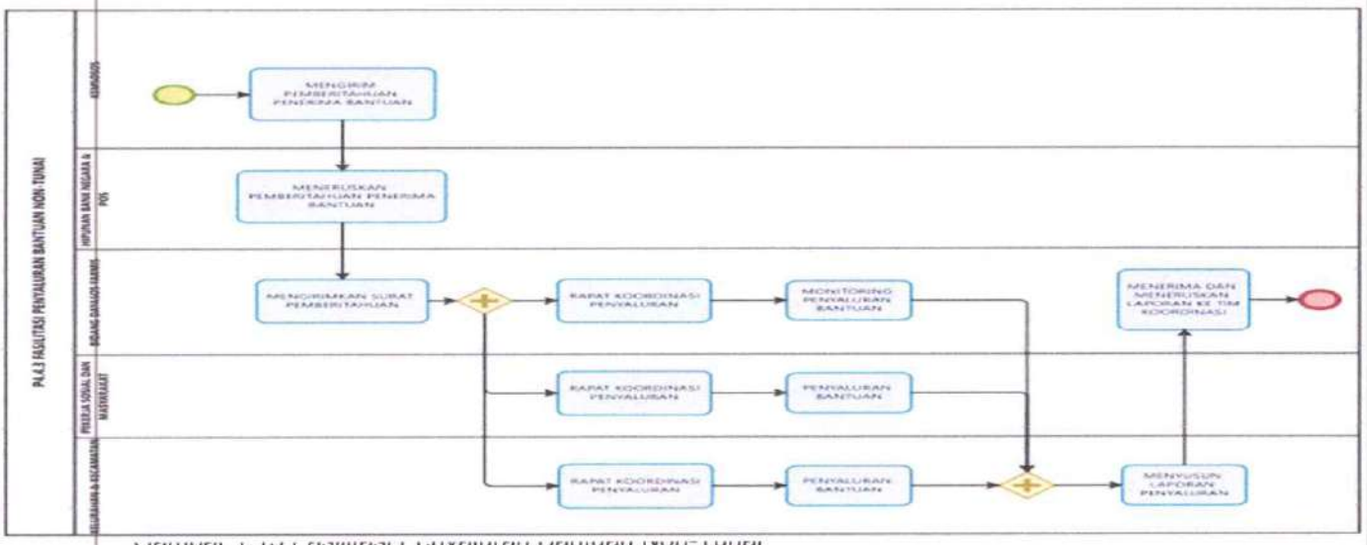

Gambar 1.15 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Non-Tunai

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Non-Tunai merupakan proses penyaluran bantuan sosial non tunai yang akan diserahkan kepada Masyarakat. Dimana saat akan memberikan bantuan sosial akan diadakan rapat koordinasi penyaluran, monitoring penyaluran bantuan dan penyusunan laporan penyaluran.

VALIDASI CALON PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

38 P6.1.1 VALIDASI CALON PENERIMA BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

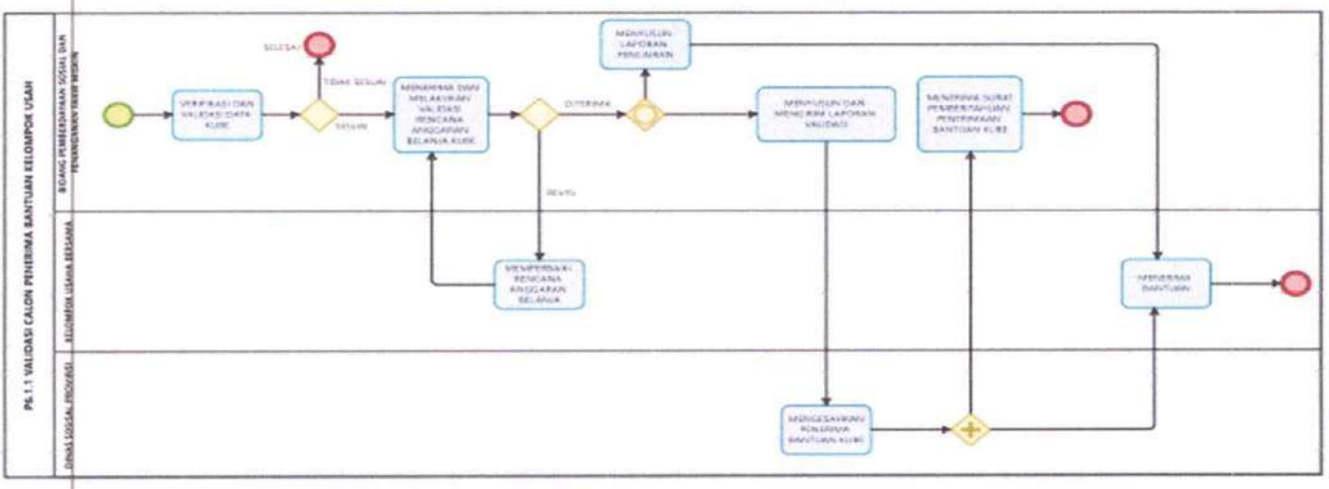

Gambar 1.16 Validasi Calon Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama

Validasi Calon Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama dengan cara memverifikasi dan memvalidasi data kelompok usaha Bersama. Kelompok usaha Bersama mengajukan rancangan anggaran belanja yang akan dilakukan validasi terkait rancangan anggaran belanja. Dinas Sosial akan mengesahkan penerima kelompok usaha Bersama dan akan diberikan nama-nama yang telah disahkan oleh Dinas Sosial.

MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

40 P6.1.3 MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

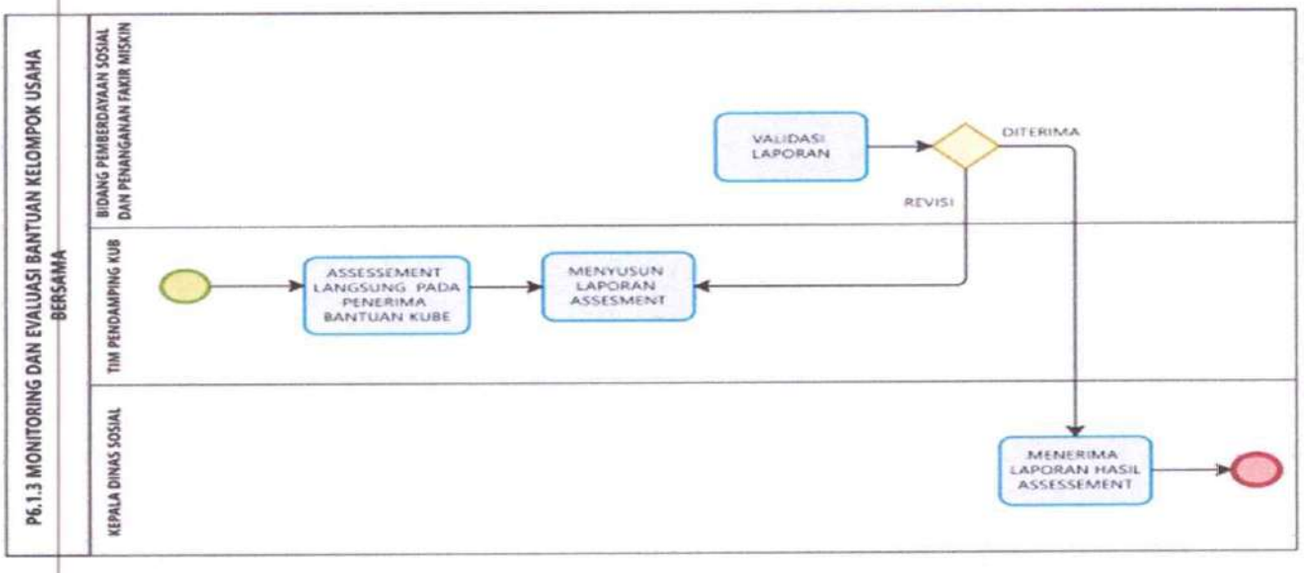

Gambar 1.17 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Usaha Bersama

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Usaha Bersama merupakan monitoring yang dilakukan pendamping kelompok usaha dan pembuatan pelaporan hasil pendampingan terhadap kelompok usaha Bersama. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin memvalidasi laporan yang telah dibuat oleh pendamping dan memberikan laporan hasil validasi kepada Kepala Dinas Sosial.

FASILITASI PROSES PENDIRIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

47 P6.3.2.1 FASILITASI PROSES PENDIRIAN LKSA

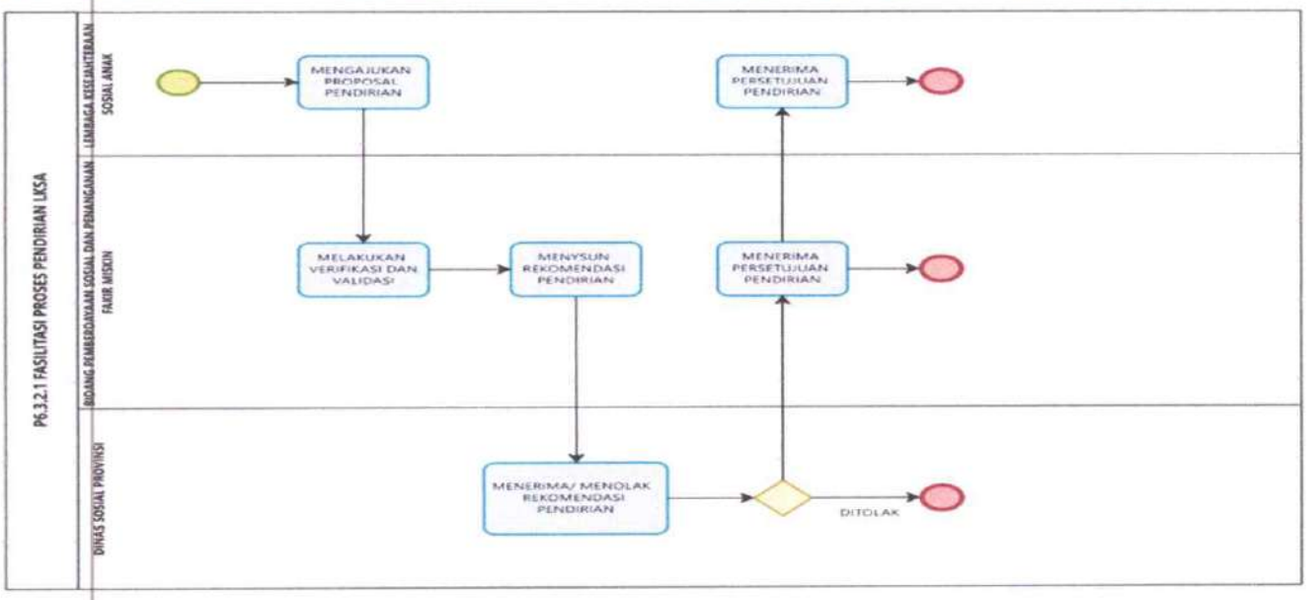

Gambar 1.18 Fasilitasi Proses Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Fasilitasi Proses Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan cara Lembaga mengajukan proposal pendirian kepada Dinas Sosial yang akan ditangani oleh bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin melakukan verifikasi, validasi kepada proposal yang telah diajukan Lembaga dan Menyusun rekomendasi pendirian Lembaga. Kepala Dinas sosial menerima.menolak rekomendasi pendirian Lembaga kesejahteraan sosial anak sesuai dengan persayaratan atau ketentuan yang tercantum. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin akan memberikan hasil pendirian Lembaga kesejahteraan sosial anak kepada lembaga yang mengajukan.

PEMBINAAN KELEMBAGAAN LKSA

48 P6.3.2.1 PEMBINAAN KELEMBAGAAN LKSA

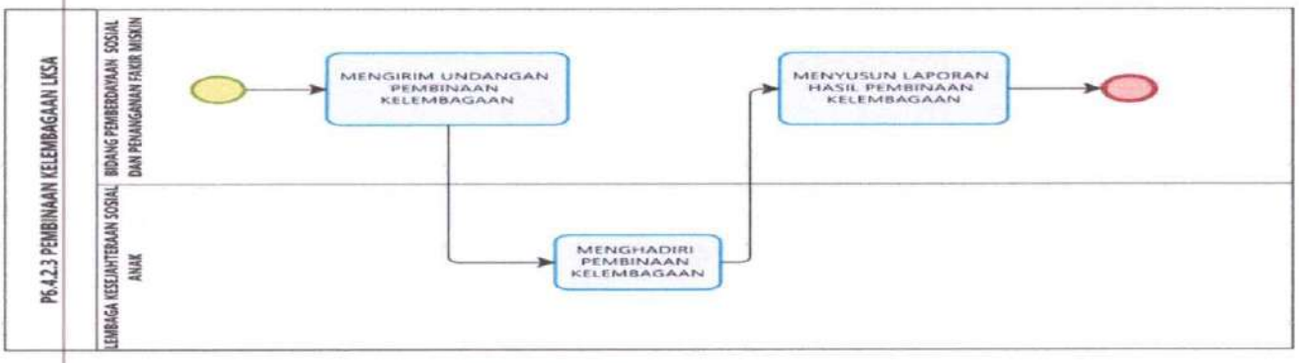

Gambar 1.19 Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pembinaan Kelembagaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pembinaan bagi kelembagaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

FASILITASI PROSES AKREDITASI LKSA

49 P6.3.2.2 FASILITASI PROSES AKREDITASI LKSA

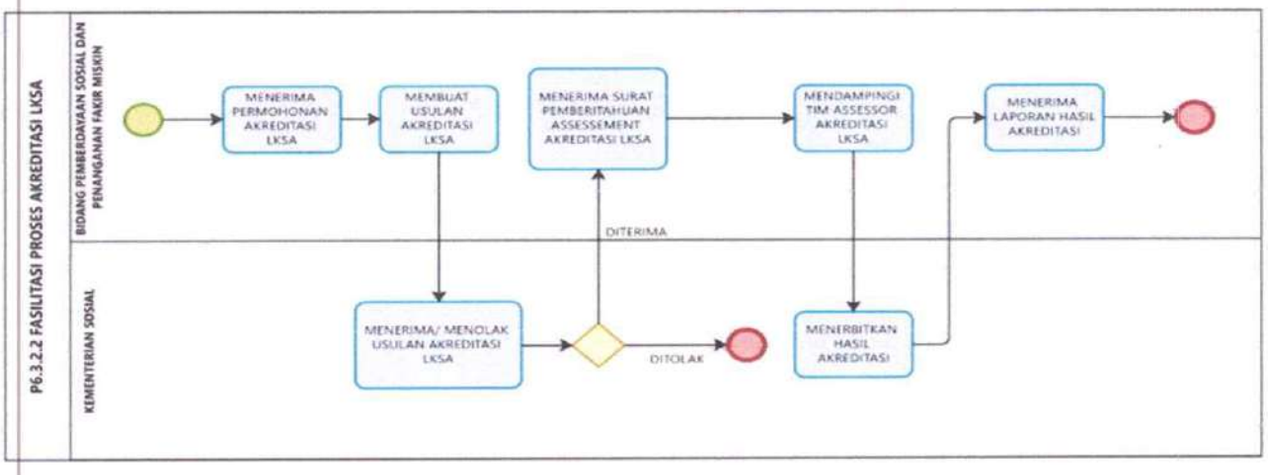

Gambar 1.20 Fasilitasi Proses Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Fasilitasi Proses Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pemberian fasilitasi akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKSA

50 P6.3.2.4 PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKSA

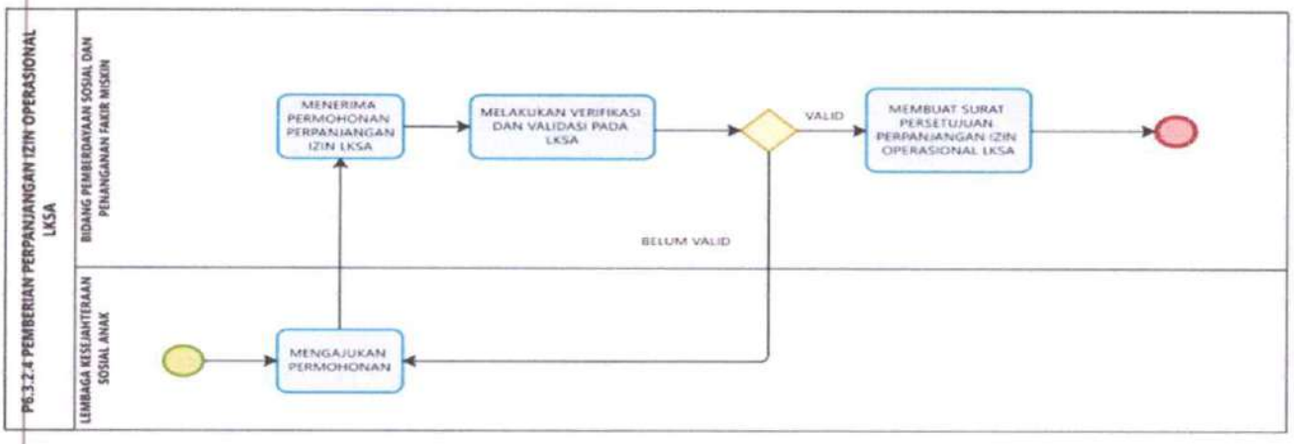

Gambar 1.21 Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan pemberian izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

PEMBERDAYAAN PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH (MUDIN)

51 P6.4 PEMBERDAYAAN PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH (MUDIN)

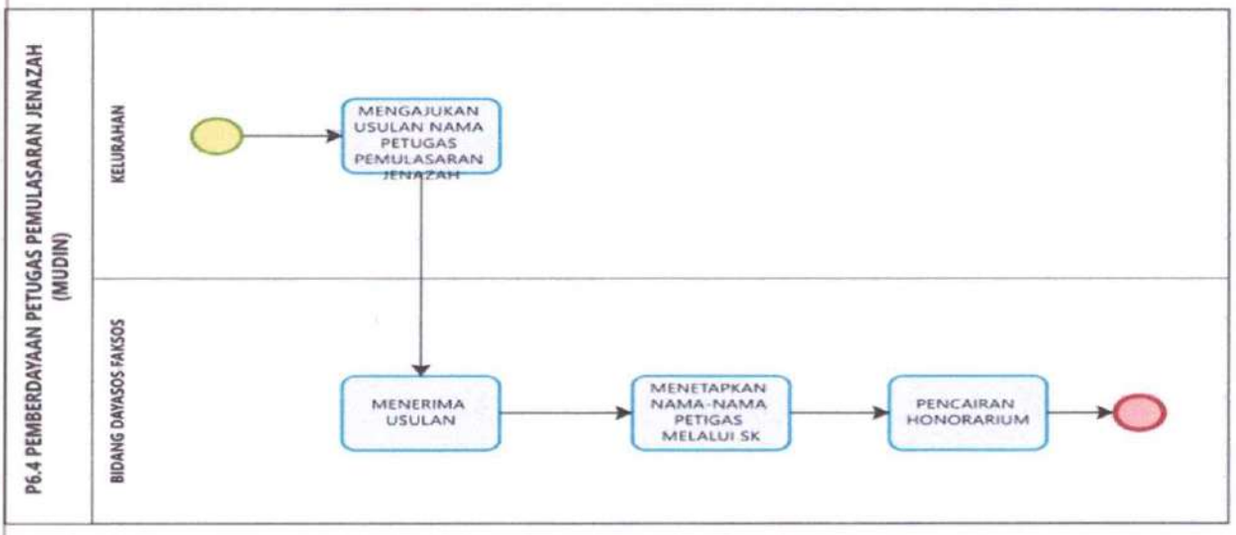

Gambar 1.22 Pemberdayaan Petugas Pemulasaran Jenazah (Mudin)

Pemberdayaan Petugas Pemulasaran Jenazah (Mudin) merupakan pemberian tali asih bagi petugas pemulasaran jenazah.

PEMEBERDAYAAN PEMUDA KARANG TARUNA

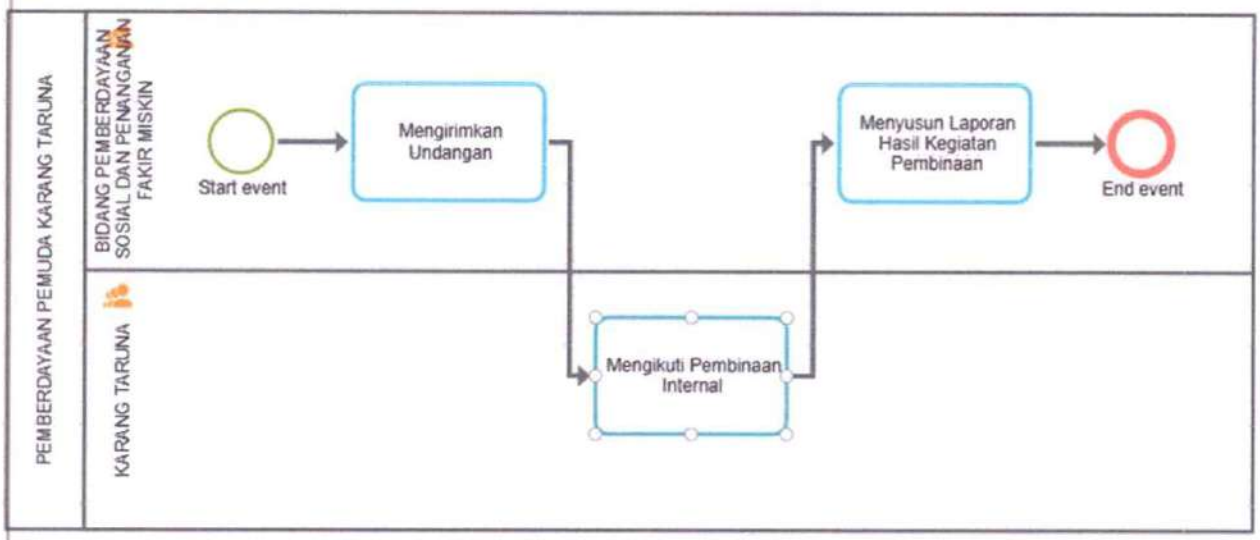

Gambar 1.23 Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna

Pemberdayaan Pemuda Karang Taruna digunakan untuk mengembangkan, meningkatkan dan memberikan kesadaran serta tanggung jawab sosial untuk generasi muda.

PENYELENGGARAAN DAPUR UMUM

31 P4.4.1 PENYELENGGARAAN DAPUR UMUM

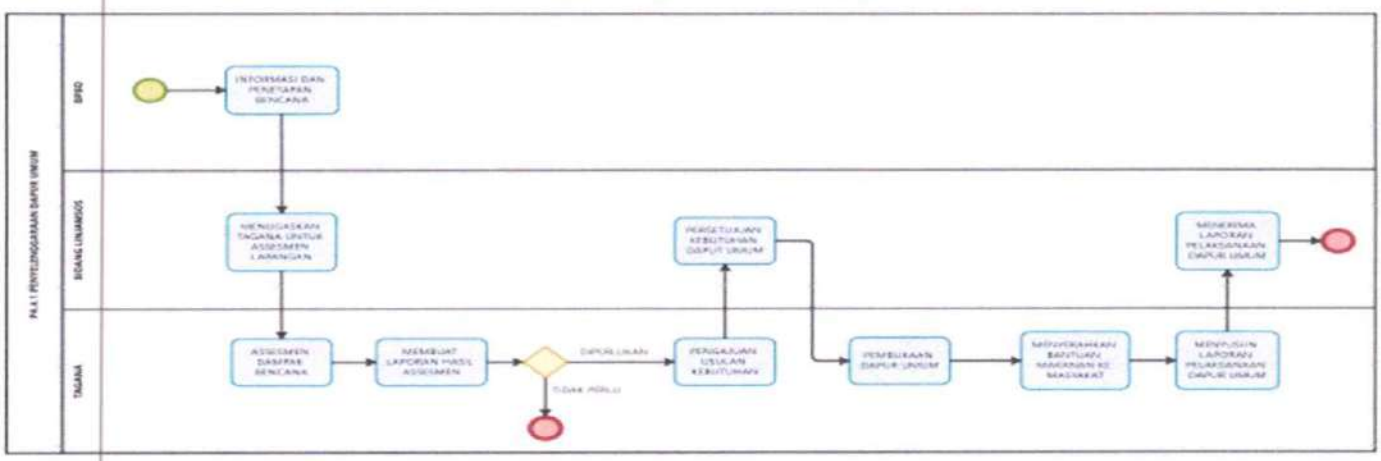

Gambar 1.24 Penyelenggaraan Dapur Umum

Penyelenggaraan Dapur Umum merupakan penyelenggaraan dapur umum berdasarkan informasi dari BPBD yang nantinya bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan mengerahkan tagana untuk assesment ke lapangan. Tagana akan memantau kondisi yang nantinya akan menentukan untuk membuka dapur umum atau tidak dan laporkan kepada bidang perlindungan dan jaminan sosial.

PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN

32 P4.4.2 PEMBERIAN BANTUAN

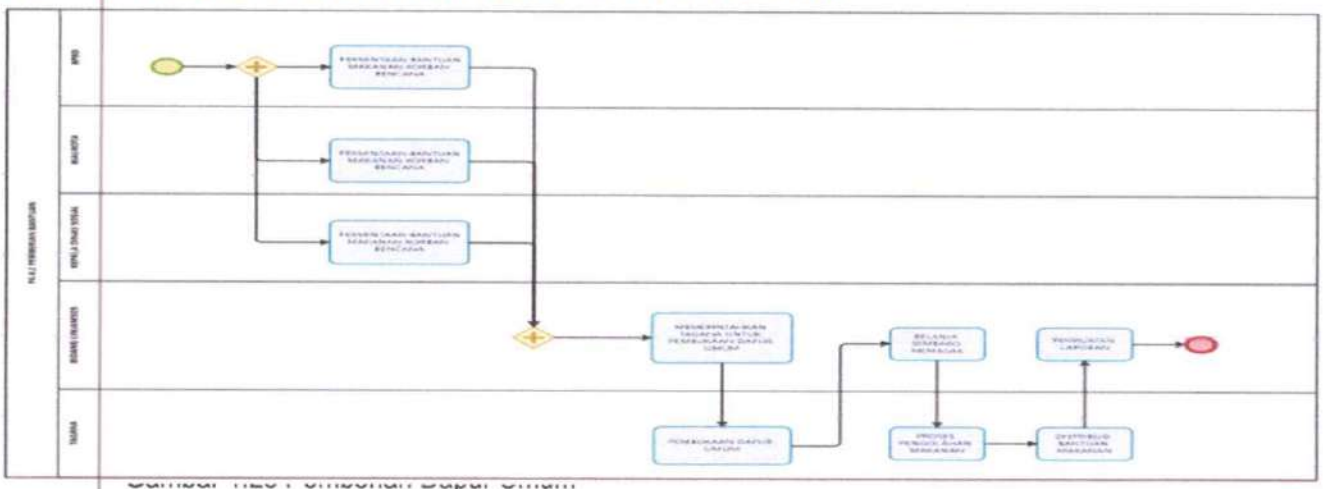

Merupakan Proses Bisnis yang terkait dengan pemberian bantuan makanan pada korban bencana alam

1.2.3 Dukungan SDM

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian	1
4	Kepala Bidang	3
5	Pejabat Fungsional	3
6	Pegawain Staff ASN	15
7	Tenaga Kontrak	5
8	Pekerja Harian Lepas	19

1.2.4 Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial memiliki 4 bangunan meliputi :

Kantor Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Ruangan Kepala Dinas	1
2	Ruangan Sekretaris	1
3	Ruangan Kepegawaian	1
4	Ruangan Keuangan	1
5	Ruangan Bidang Pemberdayaan Sosial	1
6	Ruangan Bidang Rehabilitasi Sosial	1
7	Ruangan Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
8	Ruangan Rapat	1

9	Ruangan Sekretariat PKH	1
10	Ruangan Sekretariat TKSK	1
11	Ruangan Sekretariat Tagana	1
12	Ruangan Arsip	1
13	Musholllah	1

Aset Ruangan Kepala Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	meja	1
2	kursi	3
3	Set kursi	1
4	AC	1
5	Kulkas	1
6	TV	1
7	Laptop	1
8	Tablet	1

Aset Ruangan Sekretaris Dinas Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	2
2	Kursi	4
3	Lemari Arsip	1
4	AC	1

Aset Ruangan Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	1
2	Laptop	2
3	Printer	3
4	Meja	5
5	Kursi	7
6	AC	1
7	Felling Kabinet	1
8	Rak Buku	1
9	Mesin Scanner	1
10	Mesin Oenghancur Kertas	1
11	Lemari	2
12	Papan Tulis	1

Aset Ruangan Keuangan

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	2

2	Printer	3
3	Laptop	4
4	Meja	7
5	Kursi	11
6	AC	1
7	Set Felling Kabinet	1
8	Brankas	1
9	Lemari	1

Aset Ruangan Bidang Pemberdayaan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	3
2	Printer	4
3	Laptop	3
4	Meja	8
5	Kursi	9
6	AC	1
7	Felling Kabinet	4

Aset Ruangan Rehabilitasi Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	5
2	Printer	5
3	Laptop	2
4	Meja	11
5	Kursi	12
6	AC	2
7	Felling Kabinet	3
8	Kulkas	1
9	Papan Tulis	1

Aset Ruangan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Personal Computer (PC)	4
2	Printer	3
3	Laptop	3
4	Meja	8
5	Kursi	8
6	AC	1
7	Lemari Arsip	1
8	Papan Tulis	1

Aset Ruangan Rapat

No	Uraian	Jumlah

1	Kursi Rapat	43
2	Kursi Narasumber	3
3	Meja Narasumber	1
4	Meja Panjang	2
5	TV	1
6	AC	2
7	Speaker	2
8	Mixer	1
9	CCTV	1

Aset Ruang Sekretariat PKH

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	1
2	Kursi	1
3	Felling Kabinet	1

Aset Ruangan Sekretariat Tagana

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	1
2	Kursi	1
3	Felling Kabinet	1

Aset Ruangan Anak Hebat

No	Uraian	Jumlah
1	Meja Resepsionis	1
2	Kursi Resepsionis	1
3	Set Kursi Tamu	1
4	Lemari	1
5	AC	4
6	Kipas Angin	1
7	Kasur	5
8	Dipan	1
9	Meja Resepsionis	1
10	Meja Besar	2

Aset Ruangan Anak Hebat Disabilitas (REHAT)

No	Uraian	Jumlah
1	Kipas Angin	2
2	Set Kursi	2
3	Meja	2
4	Kursi	3
5	Lemari	1
6	Felling Kabinet	1

7	AC	1

Aset Taman Makam Pahlawan

No	Uraian	Jumlah
1	Meja	1
2	Kursi	1
3	Papan Tulis	1

1.2.5 Anggaran

Besaran anggaran yang dimiliki Dinas Sosial sesuai dengan usulan masyarakat melalui musrenbang serta menyesuaikan kebutuhan dinas. Sumber anggaran berasal dari APBD yang ter tuang pada DPPA tahun 2024.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp. 22.904.667.970
APBD	2024	Rp. 23.947.995.924

Sumber : Dokumen DPPA tahun 2023 dan 2024

1.3. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial KotaPasuruanTahun 2022 disusun beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan No 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis pada Dinas Sosial Kota Pasuruan, dan sistematika penyajiannya.

BAB II **Perencanaan Kinerja**
Memuat Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024.

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**
3.1 Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Target Sasaran Strategis tahun 2024, juga evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024 yang diuraikan per sasaran strategis dan akuntabilitas anggaran, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya.
3.2 Anggaran yang telah teralisasi diperuntukkan sesuai dengan perencaan yang telah disusun dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat.

BAB IV **Penutup**
Dinas Sosial telah melakukan kinerja semaksimal mungkin dalam masalah sosial, meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Verifikasi dan Validasi data terkait penerima bantuan sosial.

LAMPIRAN 1. PK (Perjanjian Kinerja).
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

1. Sudah melakukan koordinasi dengan Bappelitbangda terkait rumusan indikator dan target kinerja pada IKU (Indikator Kinerja Utama) dan PK (Perjanjian Kinerja).
2. Sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis digital.
3. Telah dilampirkan bukti bandingan capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja level nasional.
4. Telah dilampirkan informasi terkait penggunaan sumber daya alam.
5. Melaporkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik.
7. Tiap 3 bulan akan dilakukan evaluasi internal, membuat notulensi dan meningkatkan capaian kinerja periode berikutnya

1.6 Langkah Perbaikan Internal Perangkat Daerah atas rekomendasi LKJIP 2023

1. Melakukan evaluasi internal sebagai sarana peningkatan kinerja.
2. Melakukan pemetaan risiko sebagai langka awal dalam mengantisipasi terjadi risiko.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabarandari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam halini Dinas Sosial Kota Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nomor :188/79/423.105/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan PerubahanTahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan//kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebutditujukan untuk mewujudkanvisi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai suatu system perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Pasuruan dan stakeholders.

Selanjutnya Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Walikota dan Wakil Walikota beserta segenap aparatur sebagai pelaksana dan penyelenggara

pembangunan di Kota Pasuruan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Pasuruan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi harus mampu di bangun menuju ***PASURUAN KOTA MADINAH " Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya "***

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah Misi I dan Misi III, yaitu :

Misi I : *Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.*

Misi III: *Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh, Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Penanganan Covid-19 yang Tangkas.*

Misi Dinas Sosial yang mendukung capaian Visi Walikota Pasuruan adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah sosial;
b. Terwujudnya peningkatan dan perluasan pembangunan kesejahteraans osial oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapaidari Visi dan Misi diatas adalah :

- Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosialdasar (PPKS)

Sasaran adalah penjabarandari tujuan, yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasisosial. Idealnya sasaran dapat dijabarkan secara kuantitatif sehingga dapat diukur pencapaiannya. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara focus, efektif dan efisien.

Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);

Tujuan dan Sasaran pada Dinas Sosial diatas sudah mengalami perubahan yang didasarkan oleh rekomendasi nara sumber Kemenpan RB, Tim SAKIP Kota dan Bapelitbangda Kota Pasuruan.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnyakemandiriannpemerlu pelayanan sosialdasar (PPKS)	MeningkatnyaLayananPemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakseslayan ansosialdasar	90%	92%	95%	97%	99%

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Berikut adalah Formula IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024:

Tabel 2.2.
Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula		
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	PPKS yang terakses layanan sosial dasar	Jumlah PPKS yang terlayani sosial dasar ----------x 100% Jumlah total PPKS	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024

2.2. Rencana Kinerja tahun 2024

Tujuan dan Sasaran beserta indikator selaras denga Renja PD yang dituangkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan sosial dasar (PPKS)	1.1	Meningkatnya Layanan emerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	95

Sumber :Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Target kinerja pada tingkat Sasaran Strategis akan menjadi tolak ukur tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 10.094.743.800,00
2. Pogram Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.242.615.300,00
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.931.255.983,00
4. Penanganan Bencana	Rp. 496.240.600,00
5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Rp. 51.160.400,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.572.212.207,00

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPA 2024 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegatan	Target Capaian Kinerja
1	2	3
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
DINAS TENAGA KERJA		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%
	Persentase PSKS yang Aktif	87%

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.875 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	80%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang MendapatkanAkses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPantiSosialP	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	35,62 %%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Item
	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.440 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Anak

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	3,31%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	5,7%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6.452 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.989 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenganan Kabupaten/Kota	4.288 Orang
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	60 %
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	60,2 %
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	254 Makam

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran	
1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	7.325.787.148
	1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	797.082.800
	1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota		Rp.	11.321.800
	1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota		Rp.	4.412.144.148
	1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	2.105.238.400
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPantiSosial		Rp.	1.607.727.200
	2.1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp.	171.421.100
	2.2	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	104.248.800
3		Rehabilitasi SOsial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial		Rp.	1.332.057.300
	3.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Rp.	30.973.000
	3.2	Penyediaan Alat Bantu		Rp.	47.802.200
	3.3	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Rp.	1.134.453.400
	3.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	118.828.700
4		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	6.684.867.513
	4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	294.517.600
	4.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp.	1.701.486.800
	4.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp.	4.688.863.113
5		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota		Rp.	98.733.400
	5.1	Penyediaan Makanan		Rp.	55.242.000
	5.2	Penyediaan Sandang		Rp.	5.935.800
	5.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Rp.	3.520.600
	5.4	Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan		Rp.	3.000.000
	5.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp.	31.035.000
6		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Rp.	297.507.100
	6.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp.	297.507.100

7		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.	101.140.400

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Awal dan Setelah PAK Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
			Sebelum	Setelah
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95 %	95 %

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

PROGRAM		ANGGARAN	
		Sebelum	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 10.094.743.800,00	Rp. 7.325.787.148,00
2.	Pogram Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.242.615.300,00	Rp. 1.607.727.200,00
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 5.931.255.983,00	Rp. 6.684.867.513,00
4.	Penanganan Bencana	Rp. 496.240.600,00	Rp. 396.240.500,00
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Rp. 51.160.400,00	Rp. 101.140.400,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.572.212.207,00	Rp. 4.572.212.207,00

Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan berdasarkan DPA 2024 Dinas Sosial dijelaskan pada tabel di bawahini :

Tabel 2.7. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kota Pasuruan Perubahan Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegatan	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
DINAS TENAGA KERJA			

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang tersalurkan	100%	100%
	Persentase PSKS yang Aktif	87%	87%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%	100%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.875 Orang	1.875 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	5 Lembaga
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,2%	9,2%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	80%	80%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang MendapatkanAkses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPantiSosialP	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	35,62 %%	35,62 %%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	38 Orang
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Item	25 Item

	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.440 Orang	1.440 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Anak	25 Anak
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	3,31%	3,31%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	5,7%	5,7%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	6.452 Keluarga	6.452 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.989 Keluarga	1.989 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenganan Kabupaten/Kota	4.288 Orang	4.288 Orang
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	60 %	60 %
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan dasar	60,2 %	60,2 %
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000 Orang	12.000 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang aktif	100%	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	48 Orang	48 Orang

	Bencana	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	2 %	2 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	100%
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	254 Makam	254 Makam

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024

Kegiatan / Sub Kegiatan				Anggaran	
1		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	7.325.787.148
	1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi PekerjaSosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	797.082.800
	1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota		Rp.	11.321.800
	1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota		Rp.	4.412.144.148
	1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		Rp.	2.105.238.400
2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di LuarPantiSosial		Rp.	1.607.727.200
	2.1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp.	171.421.100
	2.2	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	104.248.800
3		Rehabilitasi SOsial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di LuarPanti Sosial		Rp.	1.332.057.300
	3.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Rp.	30.973.000
	3.2	Penyediaan Alat Bantu		Rp.	47.802.200
	3.3	Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Rp.	1.134.453.400
	3.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rp.	118.828.700
4		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	6.684.867.513
	4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		Rp.	294.517.600
	4.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Rp.	1.701.486.800
	4.3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp.	4.688.863.113
5		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan		Rp.	98.733.400

		Sosial Kab/Kota			
	5.1	Penyediaan Makanan		Rp.	55.242.000
	5.2	Penyediaan Sandang		Rp.	5.935.800
	5.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Rp.	3.520.600
	5.4	Penanganan Khusus Bagi KelompokRentan		Rp.	3.000.000
	5.5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp.	31.035.000
6		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota		Rp.	297.507.100
	6.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Rp.	297.507.100
7		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Rp.	101.140.400

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Layanan Sosial Terintegerasi (LASTRI)

Layanan Sosial Terintegrasi merupakan aplikasi yang dibuat untuk menunjang kinerja pengolahan data masyarakat miskin melalui proses verifikasi dan validasi data, Sarana yang digunakan masyarakat untuk pengusulan pelayanan kesejahteraan sosial baik itu d Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial,Program Perlindungan Jaminan Sosial. Melalui verifikasi dan Validasi data masyarkat miskin mendapatkan bantuan akan menjamin ketepatan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, disamping itu Layanan Sosial Terintegrasi juga merupakan transparasi data khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang mengakses layanan kesejahteraan sosial yang ada pada Dinas Sosial Kota Pasuruan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akutabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori / Interprestasi	Rata – Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber :Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasill pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 3.2Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Sumber Data
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	%	95	97,85	103	Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Dan Jaminan

							Sosial

Sumber :LKPJ Tahun 2024

Dari tabel tersebut diatas, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap keberhasilan capaian kinerja serta rencana aksi akan dijelaskan pada masing masing IKU pada halaman berikutnya.

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalampelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis kinerja dengan cara membandingkan antara outputs dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai input dengan output.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan diatas, penjelasan tentang analisis capaian kinerja pada Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan "Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)"

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya layanan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel 3.2.1
Tabel Pengukuran Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95%	97,85%	103 %

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja sasaran sebesar 100,01%. (dalam katagori AA / Sangat Memuaskan)

Faktor pendukung dari pencapaian ini karena didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Mengacu pada tingkat keberhasilan capaian kinerja beserta faktor pendukung dan penghambatnya, Dinas Sosial akan menyusun rencana aksi untuk tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Dengan Perubahan Strategi Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
2. Melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan Peningkatan Kapasitan KUBE Di Setiap Kelurahan
3. Melanjutkan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data KPM Pemenerima Bantuan Sosial Untuk Menjamin Ketepatan Sasaran
4. Pemberian Bantuan sosial kepada anak yatim, lansia potensial, penyandang cacat, dhuafa, WRSE, Lansia terlantar dan pemberian Alat Bantu
5. Melaksanakan penyaluran hewan kurban sesuai dengan jadwal penyaluran
6. Melaksanakan verifikasi dan validasi data PBI untuk mendapatkan data yg akurat
7. Melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS sebagai upaya mendapatkan data akurat dan ter update

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini, Dinas Sosial melaksanakan program dan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah :

1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di LuarPanti Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program PemberdayaanSosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Tingkat keberhasilan yang dicapai antara lain meliputi peran serta stake holder, pilar-pilar sosial, dan perangkat daerah. Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah belum ada

tenaga operator data khusus PMKS, mengingat data PMKS setiap bulannya senantiasa mengalami perubahan seiring kondisi pada sasaran kegiatan.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota PasuruanTahun 2024 dengan tahun sebelumnya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indicator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indicator kegiatan tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel di bawah :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	% PPKS yang terakses layanan sosial dasar	98,2 %	92%	95%	97,85%	103 %

Sumber :LkjIP 2022, 2023

Rata-rata perbandingan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya sampai dengan realisasi tahun berjalan untuk Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertayani adalah 97,85% data perbandingan tersebut mencerminkan bahwa untuk tingkat kemajuan Tahun 2024 adalah Baik

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisas kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	97,85%	99 %	98,84%

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan reaisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi/Nama Daerah Lain	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	97,85%	-	-

Sumber :Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan Th 2024

Belum ada yang melaporkan/mengupload hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	AnalisisKeberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	% PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95 %	97,85 %	103%	Ketercapaian ini didukung oleh jalannya koordinasi dan konsultasi antara pilar-pilar sosial dengan Dinas Sosial	

						Kota Pasuruan Serta ketersediaan dana maupun sumberdaya manusia yang terpenuhi kuantitas dan kualitasnya.	

Sumber : Monev 2024

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumberdaya disajikan pada table berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan AnggaranTujuan dan Sasaran :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Efi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(
1	Meningkatnya layanan pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	%PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95 %	97,85 %	103 %	20.947.995.924	15.866.429.277,63	75,74	3

Sumber : LKPJ 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai efisiensi dari sasaran meningkatnya layanan PPKS sebesar 36,0%

3.1.8 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerjadi serta uraian penjelasan tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Persentase peningkatan PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasarnya	100%				Menunjang	
2	Meningkatnya layanan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	109 %			100%	Menunjang	

3				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif**	100%	Menunjang	
4				***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota***	***Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya***	97.66%		
5				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar**	100%	Menunjang	
6				**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, LanjutUsia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**	70,63%	Menunjang	
7				**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial**	100%	Menunjang	
8				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase DTKS yang di update**	114.20 %	Menunjang	

9				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase DTKS yang di update	114.20 %	Menunjang	
10				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	166.67%	Menunjang	
11				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Persentase Korban yang tertangani	166.67%	Menunjang	
12				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi anggotaTaruna Siaga Bencana kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %	Menunjang	
13				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	110%	Menunjang	
14				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam	100%	Menunjang	

					Pahlawan			

Sumber : Monev 2024

Dari tabel diatas hamper seluruh program dan kegitan menunjang dan terlaksana sesuai dan melampaui target, namun terdapat satu program yang tidak memenuhi target yakni Program Penanganan Bencana di tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Bencana yang terjadi pada Tahun 2024diKotaPasuruan

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Anggaran Program dan Kegiatan Capaian

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Rp16.115.762.761	Rp11.142.529.058	69,14%
Program Pemberdayaan Sosial	Rp 7.325.787.148	Rp6.389.584.490	87,22%
Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.607.727.200	Rp1.347.913.498	83,84%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosialis	Rp 6.684.867.513	Rp2.967.370.100	44,39%
Program Penanganan Bencana	Rp 396.240.500	Rp 344.408.580	86,92%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 101.140.400	Rp 93.252.390	92,20%

Sumber : Monev 2024

3.3 Inovasi

- Café Disabilitas

3.4 Penghargaan

- Penghargaan Pilar-pilar sosial berprestasi Tingkat Provinsi Juara 1 (Karang Werdha)
- Penghargaan Pilar-pilar sosial berprestasi Tingkat Provinsi Juara 1 (Pekerja Sosial Masyrakat)
- Penghargaan Pilar-pilar sosial berprestasi Tingkat Provinsi Juara 1 (Karang Taruna)

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraanp emerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pasuruan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indicator sasaran. Secara rinci pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat ditunjukkan pada table dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Jumlah indicator sasaran	Rata-rata capaian kinerja sasaran	Tingkat Pencapaian							
				Sangat berhasil		Berhasil		Cukup		Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI I dan III											
1	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1 (satu) Sasaran : % PPKS yang terakses layanan sosialdasar	109	-	-	109	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas bisadilihatbahwaada0 (Nihil) Indikatorsasaran yang masuk kategori " Sangat Berhasil ", 1 (satu) indikatorSasaran masuk kategori" **Berhasil** ",0 (Nihil) IndikatorSasaran masuk kategori" Cukup " dan 0 (Nihil)IndikatorSasaran masuk kategori ' Kurang ".

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa rekomendasi, yakni sebagai berikut :

1 Pelaksanaan kegiatan serta anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
2 Penambahan anggaran untuk biaya sarana.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai bab, maka Dinas Sosial Kota Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Walikota Pasuruan dengan didasari oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih diperlukan hanya berbagai penyempurnaan serta peningkatan guna mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut.

Pasuruan, 28 Februari 2025

Mengetahui/ Menyetujui
Dinas Sosial Kota pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760919 199602 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : Wali Kota Pasuruan

Selaku atasan langsung pihak pertama
selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
WALI KOTA PASURUAN	KEPALA DINAS SOSIAL
SAIFULLAH YUSUF	KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
	NIP. 19760919 199602 1 003

PERJANJIAN KINERJA
JABATAN ESELON II

NAMA	: KOKOH ARIF HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
NIP	: 197609191 199602 1 003
PANGKAT/GOL.	: Pembina Tk I (IV/b)
JABATAN / Kelas Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan
Tahun	: 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kemandirian Penerlu Pelavanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasar	8 %
2	Meningkatnya Sistem Tata kelola yang baik dalam menjamin Pelavanan Prima	Nilai Sakip	76
3	Meningkatnya Sistem Tata kelola yang baik dalam menjamin Pelavanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
4	Meningkatnya Lavanan Penerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang terakses Layanan Sosial Dasar	95 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,409,598,514	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 10,814,743,800	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2,242,615,300	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 6,475,456,600	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 496,240,600	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 51,160,400	
	JUMLAH	Rp 24,489,815,214	

Pasuruan, Januari 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE., S.Sos, MM
NIP. 19760919 199602 1 003

PERJANJIAN KINERJA
ESELON II

NAMA : KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
NIP : 19760919 199602 1 003
PANGKAT/GOL. : Pembina Tk.I (IV/b)
JABATAN / Kelas Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan
PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML		%
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Sosial Dasar (PPKS)	Presentase PPKS prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasar	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8				8		8		
2	Meningkatnya Sistem Tata kelola yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Nilai Sakip													76												76		
3	Meningkatnya Sistem Tata kelola yang baik dalam menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan yang ditindaklanjuti											100												100		100		

4	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang terakses Layanan Sosial Dasar								95																	95				
CAPAIAN OUTPUT																															
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																															

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4,409,598,514	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 10,814,743,800	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2,242,615,300	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 6,475,456,600	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 496,240,600	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 51,160,400	
	JUMLAH	Rp 24,489,815,214	

Pasuruan, Januari 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, SE, S.Sos, MM
NIP. 19760919 199602 1 003

Lampiran II Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : Plt. WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 11 September 2024

Pihak Kedua, Plt. WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL
ADI WIBOWO	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M. NIP 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95%	95%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp10.094.743.800	Rp10.094.743.800	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.242.615.300	Rp2.242.615.300	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.931.255.983	Rp6.284.383.983	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp496.240.600	Rp496.240.600	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp51.160.400	Rp51.160.400	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.646.937.907	Rp4.678.809.907	APBD
	JUMLAH	**Rp23.462.953.990**	**Rp23.847.953.990**	**APBD**

Pasuruan, 11 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E., S.SOS., M.M.
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																								
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML		%
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Layanan Pemerin Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial di-sar	Persen									95																95		
	CAPAIAN OUTPUT											95																95		
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp10.094.743.800	Rp10.094.743.800	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.242.615.300	Rp2.242.615.300	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.931.255.983	Rp6.284.383.983	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp496.240.600	Rp496.240.600	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp51.160.400	Rp51.160.400	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.646.937.907	Rp4.678.809.907	APBD
	JUMLAH	**Rp23.462.953.990**	**Rp23.847.953.990**	**APBD**

Pasuruan, 11 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197609191996021003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : Plt. WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 11 September 2024

Pihak Kedua, Plt. WALI KOTA	Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL
ADI WIBOWO	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M. NIP 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya Layanan Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95%	95%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp10.094.743.800	Rp10.094.743.800	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.242.615.300	Rp2.242.615.300	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.931.255.983	Rp6.284.383.983	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp496.240.600	Rp496.240.600	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp51.160.400	Rp51.160.400	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.646.937.907	Rp4.678.809.907	APBD
	JUMLAH	**Rp23.462.953.990**	**Rp23.847.953.990**	**APBD**

Pasuruan, 11 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
PIt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197509191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.SOS., M.M.
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | OUTPUT / OUTCOME | | |

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp10.094.743.800	Rp10.094.743.800	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.242.615.300	Rp2.242.615.300	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.931.255.983	Rp6.284.383.983	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp496.240.600	Rp496.240.600	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp51.160.400	Rp51.160.400	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.646.937.907	Rp4.678.809.907	APBD
	JUMLAH	**Rp23.462.953.990**	**Rp23.847.953.990**	**APBD**

Pasuruan, 11 September 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197609191996021003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS SOSIAL

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : Plt. WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 25 November 2024

Pihak Kedua,
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.SOS., M.M.
NIP	19760919 199802 1 003
PANGKAT / GOL	PEMBINA TINGKAT I / IV B
JABATAN / KELAS JABATAN	KEPALA DINAS SOSIAL / 11
PERANGKAT DAERAH	DINAS SOSIAL
TAHUN	2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Layanan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar	95%	95%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp10.094.743.800	Rp7.325.787.148	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.242.615.300	Rp1.607.727.200	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.931.255.983	Rp6.684.867.153	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp496.240.600	Rp396.240.500	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp51.160.400	Rp101.140.400	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.646.937.907	Rp4.832.233.163	APBD
	JUMLAH	**Rp23.462.953.990**	**Rp20.947.995.924**	**APBD**

Pasuruan, 25 November 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

WADI WIBOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197609191996021003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E., S.Sos., M.M.
NIP	:	197609191996021003
PANGKAT / GOL	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS SOSIAL / 13
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS SOSIAL
TAHUN	:	2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | OUTPUT / OUTCOME | | |

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp10.094.743.800	Rp7.325.787.148	APBD
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp2.242.615.300	Rp1.607.727.200	APBD
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp5.931.255.983	Rp6.684.867.153	APBD
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp496.240.600	Rp396.240.500	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN KOTA	Rp51.160.400	Rp101.140.400	APBD
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp4.646.937.907	Rp4.832.233.163	APBD
	JUMLAH	**Rp23.462.953.990**	**Rp20.947.995.924**	**APBD**

Pasuruan, 25 November 2024

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
Plt. WALI KOTA

ADI WIBOWO

KEPALA DINAS SOSIAL

KOKOH ARIE HIDAYAT, S.E, S.Sos., M.M.
NIP 197609191996021003